

### **BUPATI BUNGO**

### PERATURAN BUPATI BUNGO

### NOMOR 32 TAHUN 2015

### **TENTANG**

### KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI **UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 bahwa Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Kegiatan Ketahanan Pangan dan menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi baik dari jumlah, jenis, mutu maupun waktu penyaluran kebutuhan, maka perlu pengaturan penyaluran kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4	T	In	d	ar	O			_		 	_	_	_	_	2
	, ~	/ 11	V.	CLL.	L			9							#Googs.

- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011/ tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
- 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi;
- 24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT.160/12/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bungo.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- 5. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- 6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
- 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya tediri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Perimerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan /atau petani di sektor pertanian.
- 12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
- 13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- 14. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di produksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 15. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dan HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
- 16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang.
- 17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
- 18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
- 19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 20. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
- 21. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik yaitu pupuk urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik dalam negeri.
- 22. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gersik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
- 23. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 24. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 25. Kelompok Tani adalah kumpulan dari petani yang mempunyai kesamaan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 26. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya di sebut RDKK (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 27. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya di sebut KPPP (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

### BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

### **BAB III**

### PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2016;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk Kabupaten Bungo dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas terkait Kabupaten Bungo dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bungo;

### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, satuan kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, budidaya dan perikanan peternakan dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas subsektor masing masing.
- (2) Satuan Kerja yang membidangi tanaman pangan, Hortikultura, peternakan, pekebun, dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya;

**BAB IV** ..... 7

### **BAB IV**

### REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 6

- (1) Apabila kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana Pupuk subsidi dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 ( satu ) tahun;

### BAB V

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi pupuk.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV bedasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk besubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh dana Tugas Perbantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang selanjutnya akan diteruskan ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (1) Pelaksana Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan penambak ketentuan yang berlaku di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

### HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp	1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	=	Rp	2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	==	Rp	1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	=	Rp	2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	==	Rp	500,- per kg

(3) Harga ..... 9

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak atau Petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = 50 kg; b. Pupuk SP-36 = 50 kg; c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 50 kg; e. Pupuk Organik = 40 kg;

### Pasal 11

(1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:

### "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyalur Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA berwarna orange.

### **BAB VII**

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Pelaksana Subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani / Petambak dan/atau Kelompok tani;

### Pasal 13

- (1) KPPP di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh;
- (3) KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### Pasal 14

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BUNGO, SEKDA KAB. BUHGO

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal *3*0 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015, NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

# TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

S EKDA KAB. BUNGO	22		The amount could appropriate particular incomments.	10000	JUMLAH	
500,00	3.661,00	851,39	1.410.00	2 805 46	Filling at Paragraph 2	1
00,00	0/4,00	24,00	24,00	40,00	Limbur Lubuk Mengkuang	17
32 00	77/ 00	0,00	0,00	24,00	Muko - Muko Bathin VII	16
I	32.00	00,00	0,00	48,00	Rantau Pandan	15
1	56.00	8 00	8 00	210,00	Jujuhan IIIr	14
16,00	208,00	42,00	120,00	218 00	oujuian	CT
10,00	212,00	24,00	32,00	157,00	Trinhon	1 1
10,00	1.009,00	345,39	375,00	980,15	Pelenat Ilir	3 :
00 000	1 000 00	011,00	4/1,00	670,31	Pelepat	
112.00	736.00	312.00	471 00	+0,00	Bathin II Pelayang	10
1	48,00	8.00	8 00	10.00	Dallim III Oid	V
1	/6,00	8,00	8,00	68,00	Dathin III III	
	70,00	8,00	40,75	68,00	Tanah Sepenggal Lintas	00
	76 00	0,00	00,00	128,00	Tanah Sepenggal	7
ı	144,00	8 00	00 88	100 00	Tanah Tumbuii	6
-	132,00	8,00	96,00	124.00		
02,00	100,001	24,00	32,00	80,00	Bathin II Babeko	וט
30 00	166.00	0,00	59,25	72,00	Bathin III	4
	64 00	0,00	10,00	48,00	Rimbo Tengah	ယ
1	40.00	8 00	16.00	1000	Bungo Dam	7
-	72,00	8,00	16,00	96.00		,
	TO,00		8,00	34,00	Pasar Muara Bungo	-1
and a	16.00		I	ONES		1
ORGANIK	NPK	ZA	SP-36	TIDEA	KECAMATAN	NO
	ON)	PUPUK (DALAM TON)	JENIS PUP			
	A 1171					

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR LAMPIRAN II **TAHUN 2015** 

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR

The second control of the second state of the second secon						
00,00	3.661,00	851,39	1.410,00	2.895,46	JUMLAH	
				1	PERIKANAN BUDIDAYA	CJ
1					PETERNAKAN	4
477,00	2.636,00	571,39	926,00	1.916,96	PERKEBUNAN	ω
11,00	40,00	14,00	8,00	90,15	HORTIKULTURA	2
12,00	985,00	266,00	476,00	888,35	TANAMAN PANGAN	Н
ORGANIK	NPK	ZA	SP-36	UREA	SUB SEKTOR	NO
	3)	ENIS PUPUK (DALAM TON	JE			

H. SUDIRMAN ZAIN

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

					CONTRACTO	
12,00	985,00	266,00	476,00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		T
3000		1	Em. (1997)	9	Limbur Lubuk Mengkuang	17
1	m ( ) / ( )			00,01	Muko-Muko Bathin VII	16
	16.00			40,00		15
1	40.00	1 0 7 0 0	90,00	120,00	Jujuhan Ilir	14
1	152,00	26.00	00.00	100 00	1	LS
1	32,00	1	1	32.00		1 6
	00,601	88,00	1	56,00	Delenat Ilir	1
	100,00	132,00	136,00	92,35	Pelepat	1
12.00	120.00	17000		32,00	Bathin II Pelayang	10
1	32.00				Bathin III Olu	9
1	60,00	1		60 00	Torror Colorador	
	00,00	1	32,75	60,00	Tanah Sepenggal Lintas	o
1	00 00		00,00	120,00	Tanah Sepenggal	7
1	128.00	1	00.00	120,00	Tanan Tumoun	0
-	116,00	1	88.00	116 00	The state of the s	To
	110,00	-	1	16,00	Bathin II Babeko	ות
	16.00	-	43,23	40,00	Bathin III	4
1	40.00		200	10,00	Rimbo Tengah	ယ
1	16.00			10,00	Bungo Dani	N
1	48,00	1	3	48 00	T COULT INTEREST OF	-
w.		1	1	16,00	Pasar Muara Bungo	-
Organik	NPK	ZA	SP - 36	UREA	Kecamatan	No.
Omna all		TOTAL CHEST	Venarat			
	n)	Wahiitiihan Diiniik Siihsidi (Ton)	Wohn tri			

H. SUDIRMAN ZAINI

BUPATI BUNGO. SENDA KAB. BUNGO

TRIDWAN IS HE

NOMOR TENTANG PERATURAN BUPATI BUNGO LAMPIRAN III.1 **TAHUN 2015** 

BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK

### P KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	CJ	4	ω	22	ш	N O	
HAIMUL	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	Kecamatan	
888,35	1	16,00	40,00	128,00	32,00	56,00	92,35	32,00	60,00	60,00	120,00	116,00	16,00	40,00	16,00	48,00	16,00	Pupuk (Ton)	Kebutuhan
88,00	1	I	ŧ	16,00	ı	1	16,00	ı	8,00	8,00	16,00	16,00	ı	1	1	8,00	I	Jan	
88,00	î	1	ı	16,00	1	1	16,00	I	8,00	8,00	16,00	16,00	-	I	1	8,00	ı	Feb	
120,35	I	8,00	8,00	16,00	1	8,00	12,35	16,00	4,00	4,00	16,00	16,00	-	8,00	-	1	4,00	Mar	
76,00	Į	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	8,00	16,00	ļ	ļ	ţ	į	1	Į	į	Į	4,00	Apr	
132,00			8,00	8,00	16,00	16,00	16,00		8,00	8,00	16,00	12,00		8,00		8,00	8,00	Mei	
80,00	-		8,00	1	8,00	1	1		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8	Jun	Bular
64,00		ı		ŧ	ı	ı	ı	1	8,00	8,00	16,00	16,00	8,00	1	8,00	ı	ı	Jul	Bulan (Ton)
24,00	1		8,00	8,00		1	1	1	1	1	ı	I	1	1	1	8,00		Agus	
32,00			1	8,00	ı	1		-	1	-		16,00		1	1	8,00	-	Sept	
64,00				16,00		8,00	8,00		8,00	8,00	16,00							Okt	
72,00		1	1	16,00		8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00		8,00		1	1	Nov	
48,00	1		ľ	8,00	1	8,00	8,00	1	1	1	8,00	8,00	1	8,00	ı	1	1	Des	

### Ė SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016

	17	16	15	14	13	12	F	1 1	10	9	00	-	7	0	വ	4	ω	N	-	4	No.	
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir					Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tarrant Ochorregen	Tanah Senenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	ו מאמת ואז ממדמ המדיף	Pasar Milara Bilngo	Kecamatan	
476,00		-	1	96,00		1		136,00	ı	99	32,75	000	80,00	88,00		43,25	1	1		•	Pupuk (Ton)	Kebutuhan
88,00	1	1	-	10,00	1			32,00	1	1	0,00	0 0	16,00	16,00	1		1	1		-	Jan	
72,00	ı	1		10,00	1000			16,00	1	1	0,00	0 0	16,00	16,00	-	1	ı	-		1	Feb	
24,00		1	1	10,00	16 00			1		1	1		ı	5	1	8,00				1	Mar	
16,00	1	1		TO,00	16.00		1	ı	1	1	1		ı	•	ı	1				ı	Apr	
56,75		1	1				I	16,00	1		TO,10	16 75	16,00	1	1	8,00			1	ı	Mei	
32,00	3 ,	I	ı			1	ı	16,00	1	-			ı	8,00		8,00			ı	ı	Jun	Bulan (Ton)
43,25		1				ı	ı	8,00		1			16,00	16,00		0,20	O PH		ı	1	Jul	(Ton)
0,00		1				1	ı	-		1		1	1	1	ı	1		ı	1	ı	Agus	
To,ou	100	1				ı	ı	1				1	1	10,00	100			1	1	1	Sept	
40,00	2001				16.00	1	ı	16,00				1	16,00						ı	ı	Okt	
20,00	יות אינו				16.00	1	1	24,00			1	1	ı	0,00	000	0,00	800	1	1	ı	Nop	
44,00	34 00			ı	1	ı	1	0,00	0 00		1	1	I	0,00	8	0,00	200	1	1	1	Des	

### 0 KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	CI	4	ω	2	н	NO.	
HAIMUL	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	Kecamatan	
266,00	ı	1	1	26,00	1	88,00	152,00	ı	ı	1	ı	ŧ	1	1	1	1	1	Pupuk (Ton)	Kebutuhan
32,00	ı		ı	ı	1	1	32,00	ı	ı	1	ı	E	ı	ı		1	1	Jan	
32,00	ı	1	1	1	1	ì	32,00	ı	1	1	1	ı	ı	ı	1	1	ì	Feb	
32,00	1	1	1	ı		16,00	16,00	1	1	ı	1	B	1	1	1	-	1	Mar	
32,00	1	-	ı	ı	1	16,00	16,00	1	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ſ	I	Apr	
8,00	ī	ī	ſ	8,00	ı	ſ	ı	ť	г	ſ	r	1	ſ	ı	ī	ı	ſ	Mei	
40,00		ı		8,00		16,00	16,00		ı	1	1	ı	1	ı	ı	ı	1	Jun	Bulan (Ton)
42,00	ı	1	1	10,00	-	16,00	16,00	1	1		1	0	1	ı	1	1	ı	Jul	(Ton)
0,00	1	ı	ı		1	-		1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1	Agus	
0,00	ı	ı	ı	ı		ı	ı		ı		,			ı	ı	ı	ı	Sept	
16,00	1	1	ı	ı	1	8,00	8,00	1	ı	1	1	1	ı	1	1	ı	1	Okt	
16,00	1	1	1	1	ı	8,00	8,00	ŧ	ı	1	1	1	1	1	3	1	1	Nop	
16,00	1	ı	1	ı	1	8,00	8,00	t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Des	

### Ö KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15					1	9	00	7	0	U	4	C	12			No.
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo		Kecamatan
985,00	-	16,00	40,00	152,00	32,00	109,00	120,00	32,00	60,00	60,00	128,00	116,00	16,00	40,00	16,00	48,00		Pupuk (Ton)	Kebutuhan
96,00	8	1	ı	24,00		1	16,00	1	8,00	8,00	16,00	16,00	1	1	-	8,00		Jan	
96,00	ı	1	1	24,00	t	ı	16,00	1	8,00	8,00	16,00	16,00	ı	1	-	8,00	1	Feb	
144,00	ı	8,00	8,00	24,00	2	16,00	24,00	16,00	4,00	4,00	16,00	16,00	1	8,00	8	ı	ı	Mar	
80,00	1	8,00	8,00	16,00	8,00	16,00	8,00	16,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Apr	
124,00	ı	ı	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	ı	8,00	8,00	16,00	12,00	-	8,00	-	8,00	1	Mei	
120,00	ı	1	8,00	-	8,00	16,00	16,00	B	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	1	Jun	Bulan (Ton)
64,00	ı	1	ı		ı	ı	ı	ı	8,00	8,00	16,00	16,00	8,00	1	8,00	ı	1	Jul	Ton)
24,00	1	1	8,00	8,00	ı		1	ı	1	ı	I	1	1	ŧ	1	8,00	ı	Agus	
32,00	1	ı	ı	8,00	ī	1	1	1	ı	1		16,00		1	ı	8,00	1	Sept	
72,00	1		-	16,00	ı	16,00	8,00	1	8,00	8,00	16,00	I	1	ı	1	1		0kt	
80.00	1	1	1	16,00	1	16,00	8,00	1	8,00	8,00	8,00	8,00	-	8,00	1	1	1	Nop	
53,00		1		8,00	ı	13,00	8,00	1	1	1	8,00	8,00	1	8,00	1	1	1	Des	

### H SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016

Γ		17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	9	υı	4	ယ	2	ш	No.	
	HAIMUL	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	RECAMATAN	77.07.07.0
	11,00	1	1		1	2	11,00		1	8			100			1		8	Pupuk (ton)	Kebutuhan
	ı	1		1	ŧ	,	1	,	,	,	,	1	1	J	,	,		,	Jan	
	11,00	1	1	1	2	1	11,00		1	ì	1	1	8	3	3	1	1	1	Feb	
	1	1	I	1	1	1	ı	1	1		8	1	1	1	ī	1	5	1	Mar	
	1	1	1	ı	1	1	1	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	10	Apr	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mei	
	1	1	1	ı	P	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	ı	I	Juni	Bulan (Ton)
	1			1		1	'		1	1	1	1	1	1	1	1	8	'	Juli	Ton)
	1	1	8	1		I	9	1	1		1	1	1	1	1	1	1		Agust	
	5	8	£	1			-	8	-	-	1	I	1	1	1	1	1	1	Sept	
	g	0	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Okt	
or and the same of		1	1	1	1	1	1	1		1	ı	ē	3	ı	I	1	1	1	Nop	
S EKOA KAB. BUN		1	1	8	1	ı	'	1	1	1	ş	1	8	3	2	100	1	1	Des	

BUPATI BUNGO,

H. RIDWAY, IS. M.

H. SUDIRMAN ZAINI

TENTANG PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR LAMPIRAN IV BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK **TAHUN 2015** 

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

and the state of t						
11,00	40,00	14,00	8,00	90,15		
11 00		1	3	1	Limbur Lubuk Mengkuang	17
	1	1	1	ī	Muko - Muko Bathin VII	16
		1	1	1	Rantau Pandan	15
1	47,00	1	1	1	Jujuhan Ilir	14
1	24 00		1	1	Jujuhan	13
-	I	I 1,000		24,13	Pelepat llir	12
11.00	1	14.00		04 15	Pelepat	11
1	16,00	1	8.00	40 00		4
-	1	1	1	1	Bathin II Pelayang	10
-	1	1	8	1	Bathin III Ulu	9
		1	1		Tanah Sepenggal Lintas	00
1		1	1		Tanah Sepenggal	7
1	-	The state of the s	1	1	Tanah Tumbuh	6
			1	1	Bathin II Babeko	IJ
			1	1	Bathin III	4
1		1	1		Rimbo Tengah	ω
	1	1	1	16,00	Bungo Dani	2
		1		10,00	Pasar Muara Bungo	니
ORGANIK	NPK	ZA	SP-36	UREA	KECAMATAN	No.
		JENIS PUPUK (DALAM TON)	JENIS			

BUPATI BUNGO, SEKDA KAS. BUNGO

REDWAN, IS, MM

H. SUDIRMAN ZANI

TENTANG NOMOR TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI BUNGO LAMPIRAN IV.1

BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

Г	T	T	T	L	L	T	L	T	Т	Т	Т	Т	T	Т	Г	Т	T	Т	Hal
-	17			1	13		_	10	9	00	7			4	ω	12	丄		No.
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo		KECAMATAN
90,15		100	1	1		24,15	40,00	1	ı	-	1	1		-	1	16,00	10,00	Pupuk (ton)	Kebutuhan
8,00	1	ē	1	1	ı	1	8,00	ı	1	I	1	ı	I	1	1	í	ı	Jan	
24,15	1	1	1	ı	I	16,15	8,00	1	1	I	I		1	ı		1	1	Feb	
38,00		ı	1	ı	ı	8,00	16,00	ı	1	1	ı	ı	ı	1	1	8,00	6,00	Mar	
12,00	ą.	t	t	1	1	t	i	ı	i	1	4	1	1	ŧ	1	8,00	4,00	Apr	
8	1	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	1	ī	ı	I	1		***	ı	ı	Mei	
8	3	1	1	1	3	,	1	ı	1			1			ı	ı		Juni	Bulan (Ton)
8.00		1	-			ı	8,00	ı	ı	,	-		1	1	1	I	-	Juli	Ton)
	,	J	,	ı	,	1	3	1	,	1	1	,	1	1	2	1	1	Agust	
0	1							,	1				1		100	1	ı	Sept	
	100	1	1		ı	1	1			1	,		ı	ı		1		0kt	
	3				ı		1											Nop	
0	1	1	1			ı	1				1			1 1				Des	

### Ë KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

-2-

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	SI	4	ယ	2	ы	NO.	
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	RECANDALAN	IN A TABLE OF THE
8,00	1	ı	1			1	8,00		Trans.			·		I			-	Pupuk (ton)	Kebutuhan
ß		1	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	Jan	
8,00	1	ı	1	1		1	8,00	1	1	ı	1	ı		ı	1	1	1	Feb	
1	8	1	1		3	ı	1		1	1	1		1	1	1	ı	1	Mar	
8	1	1	1	1	1		ı	1	1		1	1	ı	1	1	1	1	Apr	
1	ı				1	1	ı	1	1	1	***	1	1		1	1	ı	Mei	
	1	1	1	,	,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Juni	Bulan
п	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Juli	Bulan (Ton)
1	1	-	I	ı	1			I	1	1	1	g	1	1	1	1	1	Agust	
1	1	1	1	99	1		1	1	ŧ	ι	-	1	1	1	P	1	1	Sept	
1	1	,	1	1	1	,	1	1		1	,	3	1	1	1	3	3	Okt	
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	,	1	1	ı	ı	1	1	Nop	
8	1	ı	1		1	1	1	1	ı	1	1	ı	1		1	ı	1	Des	

## Ü KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	51	4	ယ	2	П	No.	
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	RECAINTAL AIN	
14,00	ı		1	***		14,00		4		-	1				-		100	Pupuk (ton)	Kebutuhan
3		1	1	1	1		ł	0.0	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	Jan	
1	1	1	1	1		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Feb	
8,00	1	ı	1	ı	1	8,00	ı	1	1	1	i	1				ī	1	Mar	
6,00	1		1	1	ı	6,00	1	1	1	1	ı	1	1				-	Apr	
6	ı	1	1	1	1	1	1	ı		1	1		1	1	1	1	1	Mei	
ı	1	1	-	I	1	1	1	1	ı	1	1	ı	1	1	ı			Juni	Bulan (Ton)
1	-	1	ī	1		Į	1	1	Į	1	1	1		ı	1	1		Juli	Ion)
3	1	ı	1		1	1	1			ı		1	ı		1	-		Agust	
	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Sept	
	1	-		1		1	,	-	1		1	1	1	-	-		1	Okt	
	-		-	1	-	ı	1				ı		,			1		Nop	
	-	,		1	ı			1	1	1	1	1		1		1		Des	

## KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17 L	16 N	15 F			+-		10 E	9	00	7	6	CJ.	4	ω	10	-		No.
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo		KECAMATAN
40,00	1	ı	ı	24,00		1	16,00	1	ı	ı	ŧ	1	1			1	1	Pupuk (ton)	venuturan
8,00	1	ı	1	ī	1	ı	8,00	ı	ı	1	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	Jan	
8,00	,	ľ	r	ŧ	ı	ſ	8,00	ı	ŧ	ı	ı	ı	ſ	ı	ſ	ſ	ſ	Feb	
8,00		ı	8	8,00	1	ı	-	-	1	1	ı	ı	1		ı	ı	-	Mar	
8,00	1	1	ı	8,00	ı	ı	1	1	1		1			ı	ŧ	ı	ı	Apr	
8,00			ı	8,00	ı		ı	ı	1	1		ı	1	1	ı	ı	ı	Mei	
			ŧ	t	ι	ı	ı		ı	ı	ŧ	t	ı	ı	ı	ı	ŧ	Juni	Bulan
1	1		1	1	1	1		1		,	,	1	1	1	ı	-	ŧ	Juli	Bulan (Ton)
		0		ı	1	1	-	1	-			1		1	1		,	Agust	
				,	ı	,	ı			1		1			ı		5	Sept	
				-														Okt	
				1										1	1 1		1	HON	
'   1				1	1			1 1					1					Des	

## E. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15	14	13			10	9	00	7	6	ΟΊ	4	ω	22	Н	No.	
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	RECAMALAN	
477,00	32,00	1	1	16,00	16,00	281,00	100,00	1	1		1		32,00		t	1		Pupuk (ton)	Kebutuhan
0,00	1	1	1	ı		ı	ı		ı	1	ı	ı	1	1	1	1	1	Jan	
158,00	16,00	1	1	8,00	8,00	60,00	50,00		ı		-	1	16,00	ı		ı		Feb	
80,00		1			ı	80,00		1			-		1		-	ı	ı	Mar	
0,00	1	1	1		1		1	1		1	1	1	1		-		1	Apr	
0,00		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	I	1	1	Mei	
0,00	Т	1		1	ı	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1	ı	Juni	Bulan (Ton)
0,00		-	ī	ī	-	ı	ı	t	1	ı	1	E	1	ı	ı	1	-	Juli	(Ton)
0,00		1	1	1		1	ı	1	1	1	1	1		1			1	Agust	
158,00 81,00	16,00		1	8,00	8,00	60,00	50,00						16,00					Sept	
81,00		1			1	81,00	T					1			1			Okt	
0,00		1	1	ı	1		1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	Nop	
0,00					1	-		1	1	-		1	ı	1		ŧ	1	Des	

D m se	SUBBAG PUU  SUBBAG PUU  RABAG HUKUM  TIL  RAHMAD HARIJADI, SH  WIP 19660910 199303 1 004	MIP 19760416 2002121 005	KASUB	TEL
	WALKETENTUA	35	KASUBBAG PUU	AH DITELIN SES

NO HANTITI S. 505	KASUBBAG PPP	TELAH DITELIT
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	KABAG ADM. SDA	TELAH DITELITI KEBENARANNYA

BUPATI BUNGO,

OPS H. PIMAN IS MM

H. SUDIRMAN ZAIM

ģι

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHU ANGGARAN 2016

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

THE STATE OF THE PROPERTY OF T						
477,00	2.636,00	571,39	926,00	1.910,90	O CAMADIGUAL	-
32,00	574,00	24,00	24,00	10100	ATIMI AH	
a	16,00	8,00	0,00	2000	Limbur Lubuk Mengkuang	17
	10000	900	000 8	800	Muko - Muko Bathin VII	16
	16.00	8,00	8,00	8,00	Kantau Pandan	
16,00	32,00	16,00	24,00	90,00	oujunan iiir	
16,00	180,00	24,00	32,00	125,00	Link Til	1 5
281,00	900,00	243,39	375,00	00,000		
100,00	600,00	160,00	327,00	537,96	Delenat Hir	
1	16,00	8,00	8,00	8,00	Delenat Delenat	
I	16,00	8,00	8,00	8,00	Bathin II Delaware	
1	16,00	8,00	00,8	0,00	Bathin III I III	
1	10,01	8,00	0,00	000	Tanah Senenggal Lintas	00
1	10,00	8 00	00 8	8.00	Tanah Sepenggal	7
	16.00	8,00	8,00	8,00	I anah Tumbuh	
32.00	150,00	24,00	32,00	64,00	Daumi ii babeko	1
1	24,00	8,00	16,00	32,00	Both: II Both 1	л -
1	24,00	8,00	00,61	32,00	Rothin III	4
1	24,00	3,00	1000	32,00	Rimbo Tengah	ω
	24 00	8000	16 00	32,00	Bungo Dani	2
	16.00	1	8,00	8,00	rasar Muara Bungo	-
ORGANIK	NPK	ZA	SP-36	UREA	700000000000000000000000000000000000000	-
		JENIS PUPUK (DALAM TON)	Verr		KECAMATAN	No.
			An electrical and a second and			

H.SUDIRMAN ZAMI

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK TENTANG NOMOR PERATURAN BUPATI BUNGO LAMPIRAN V.1 **TAHUN 2015** 

### BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

## KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

		L	T				Π.	J.	T	T	T	T	T	T	T	Т	T	T	
-	17 [					+	-			_	_				_				No.
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Kantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujunan	reiepat iiir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo		KECAMATAN
926,00	24,00	8,00	8,00	24,00	32,00	3/5,00	327,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	16,00	16,00	16,00	8,00	Fupuk (ton)	Kebutuhan
0,00	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	I	I	-	1	1	-	1	Jan	
290,00	16,00	8,00	8,00	16,00	16,00	64,00	50,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00	8,00	Feb	
0,00 290,00 241,00	1	1	ı	-	1	126,00	115,00	-	J	1	1	-	1	1	1	1		Mar	
0,00		ı	1	ı	1	1	1	-	I	1		ı	I	ı	ı	1	ı	Apr	
0,00	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1	-	ı	1	1	1	1	-	1	Mei	
0,00	ı	1	1	1	ı		ı	ı	1	1	ı	1	ı	ı	1	1	1	Juni	Bular
0.00	1	ī	ı	ſ		ī	ī	ī	ı	I	1	ı	ı	1			1	Juli	Bulan (Ton)
0,00	1	3	1	1	I	1	1	1	I	1	-	1	-	-	ı	1	-	Agust	
174,00	800			8,00	16,00	64,00	62,00	1	ŀ	ı			16,00	1				Sept	
174,00 221.00	1		1	9		121,00	100,00						-				7	Okt	
0.00		1	1	ı	ŧ	ı	ı						1				$\top$	Non	
0,00			1	1	1	1	1	1	ī			1					十	Des	

## 0 KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	O1	4	ω	22	Н		Z
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Rantau Pandan	Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo		KECAMATAN
571,39	24,00	8,00	8,00	16,00	24,00	243,39	160,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	24,00	8,00	8,00	8,00	0,00	Pupuk (ton)	Kebutuhan
0,00	ı	1	I	ı	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	I	ī		1	Jan	
0,00 212,00	16,00	8,00	8,00	8,00	16,00	48,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	1	Feb	
123,39	ı	ı	ı	ı	1	75,39	48,00	1	ŧ	ı	ı	1	1		1	1	1	Mar	
0,00	ı	1	1	1	1	4	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1	ı	1	ı	Apr	
0,00	ı	ı	ı	,	ı	ı	1		I	a		ı		ı		1		Mei	
0,00	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	-	Juni	Bulan
0,00	1	1	1	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	Juli	Bulan (Ton)
0,00	ı	1	ı	ı	I	ı	ı	I	ı	ı	ı	ı	8	1	I	ı	ı	Agust	
116,00	8,00	ı	I	8,00	8,00	48,00	32,00	-	1				12,00	1			-	Sept	
116,00 120,00	ı	1	ı	ę.	1		48,00		ı	ı	ı	ı		1	ı	1	1	0kt	
0,00	1	3	1	1	1	ı	-	1		1	1		-		1	1	1	Nop	
0,00	1	I	1	ı	1	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	1	1	I	ı	$\neg$	Des	

### Ä KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

	17	16	CI	1 1	1 4	1 2	1 1	10		α		1 0	2	u t	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	N	) <sub> -</sub>	1	No
JUMLAH	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko-Muko Bathin VII	Kantau Pandan	Jujunan IIIr	Jujuhan	Pelepat IIIr	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	ranan Sepenggal	Tanan Iumbun	Paris II Dabeko	Dathin III	Mindo rengan	Bungo Dani	rasar Muara Bungo	7	KECAMATAN
2636,00	574,00	16,00	16,00	32,00	180,00	900,00	600,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	150,00	24,00	24,00	24,00	16,00	Fupuk (ton)	Kebutuhan
0,00	ı	1	1	-	1	1	1	ı	ı	1		-						Jan	
542,00	100,00	8,00	8,00	16,00	32,00	150,00	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	16,00	16,00	T	8,00	Feb	
542,00 806,00	200,00	1		1	58,00	300,00	200,00	ı	ı		1	-	48,00	Π	1	1		Mar	
0,00	ı	ł	ı	-	1	1	ŧ	ı	ŀ	i	ı	1		1	1		1	Apr	
0,00	1	ı	I	1	1	1	1	ı	1	I	ī	1	1	1	1			Mei	
0,00	I	ı	ı	I			1		-	1	1			-				Juni	Bula
0,00	ı	1	1	1	1	ı	1	ı	ı		1							Juli	Bulan (Ton)
0,00	1		l	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	1	-	-	1	1	ı	Agust	
592,00	174,00	8,00	8,00	16,00	32,00	150,00	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Sept	
696,00	100,00	1	ı	1	58,00	300,00	200,00		1	I	1	1	38,00	ı	1			Okt	
0.00	_	1	ı	1	ı	1	ı	1	1	ı	1	1	I	-	-	1	ı	Nop	
0.00	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	ı	1	1	ı	ı	Des	

### H SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016

	Kebutuhan						Bulan	Bulan (Ton)				
No. Kecamatan	Pupuk (Ton)	Jan	년 년 년	Mar	Apr	Mei	Jun	BELL"	SILOV	'n	Sept	Sept Obt
					- Francisco			0 82	- Ber	1	2010	
1 Pasar Muara Bungo	1	1	dee	ı	ı	ı		ı	1		1	1
2 Bungo Dani	ı	ı	1	1	8			1				
3 Rimbo Tengah	1	1	1				1	•	8	- Annie Company of the Company of th		
4 Bathin III	ſ		1	ı	1	1	1	-	•			
5 Bathin II Babeko	8	ı	I	1	1		1		-			
6 Tanah Tumbuh	1	1		1	1		1		1			
7 Tanah Sepenggal	1	1	1	1	1	ı	1	1	1		-	
8 Tanah Sepenggal Lintas	1	,	1		1	1	1	1	ı		1	
9 Bathin III Ulu	1	ı	1	1	ı	ı	ı	1	1		-	î
10 Bathin II Pelayang	ı	ı	1	1	ı	ı	1	1	ı		,	1
11 Pelepat	12,00	ı	1	12,00	ı	1	3	1	1		1	1
12 Pelepat Ilir	1	1	1	1	1	ı	I	1				1
13 Jujuhan	1		1	ŧ	1	Į	I				1	
14 Jujuhan Ilir	I	1	1	I	8	1	1		1		╛	1
15 Rantau Pandan	ı		1	1	B	ı	ı	1				
16 Muko-Muko Bathin VII	ſ	-	1	1	ı	1			ı			
17 Limbur Lubuk Mengkuang	I	1	1	1	1	I	1		,		1	
JUMLAH	12,00	1	ı	12.00								1

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAIN

4

TENTANG PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR **LAMPIRAN VI** 

**TAHUN 2015** 

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

## SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN **KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016**

14	M V L V Ju V Jula		J.E.	ENIS PUPUK (DALAM TON	TON)
INO.	RECAMAIAN	UREA	SP-36	ZA	NPK
	Pasar Muara Bungo	1	ine		1
2	Bungo Dani	•	and the state of t	1	1
ω	Rimbo Tengah	1		ſ	1
4	Bathin III	4		1	ı
CJ1	Bathin II Babeko	1			-
0	Tanah Tumbuh	1	ı	1	
7 '	Tanah Sepenggal	1	en e	-	
00	Tanah Sepenggal Lintas			ı	1
9	Bathin III Ulu		1	1	1
10	Bathin II Pelayang	ı	ı	ı	1
11	Pelepat		•	1	1
12	Pelepat Ilir	q	1	1	ı
13	Jujuhan	ı		-	t
14	Jujuhan Ilir	ı	1	•	1
15	Rantau Pandan	1	ı	•	I
16	Muko - Muko Bathin VII	ſ	1	- *	ı
17	Limbur Lubuk Mengkuang			1	1
	JUMLAH	1	1		1

HAMBALI SH KASUBBAG PUU TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN RAHMAD HARIJADI, SH NIP 19660910 199303 1 004 ... KABAG HUKUM

NIP.187812142009062206 SUCHARTITI 9.305 WASUBBAG PPP TELAH DITELITI KEBENAKANNYA 200 TOO TOO

> BUPATI BUNGO, Section Porsphilowall IS. MM S EKDA KAB BUNGO

H.SUDIRMAN ZAMI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TENTANG LAMPIRAN VII

**TAHUN 2015** 

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

## SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

	T	17	16	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	CI	4	ω	N	1	No.	
TTSTITE	- 1	Limbur Lubuk Mengkuang	Muko - Muko Bathin VII		Jujuhan Ilir	Jujuhan	Pelepat Ilir	Pelepat	Bathin II Pelayang	Bathin III Ulu	Tanah Sepenggal Lintas	Tanah Sepenggal	Tanah Tumbuh	Bathin II Babeko	Bathin III	Rimbo Tengah	Bungo Dani	Pasar Muara Bungo	KECAMATAN	
	8	I	1	ē						12	ſ	12	ar .	ea e	3		I	ı	UREA	
	1	1	ı			8	1	9	1	1	=						5		SP-36	JEN
		1		1	1	1	3	-		1		1	1	*				1	ZA	JENIS PUPUK (DALAM TON
		1	1								en en	4							NPK	
A Company of the Comp	100		1	t	1	1		1	1	1	ī	1	1	ı	1	1		5	ORGANIK	

BUPATI BUNGO, SEKDA HAB, BUNGO

WAN, IS, MM

H.SUDIRMAN ZAINI